

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi ekonomi, peningkatan pasar keuangan dan investasi sejak tahun 1990-an telah membawa peningkatan kebutuhan akan *corporate governance*. Perkembangan ini telah mempercepat terjadinya perubahan pasar keuangan dunia pada tahun 1998. Globalisasi pasar dalam konteks tersebut telah mengantarkan kepada suatu era dimana dimensi tradisional pada *corporate governance* di definisikan sesuai dengan hukum lokal, regulasi, dan prioritas nasional (CACG, 1999 dalam Zulhelmy, 2004). Perubahan ini juga diikuti dengan perubahan ekonomi secara global di sebagian besar negara-negara tanpa terkecuali Indonesia.

Dengan meningkatnya globalisasi ekonomi, perusahaan semakin dimungkinkan untuk berinvestasi maupun memperoleh dana di pasar modal internasional. Namun demikian, kualitas *corporate governance* merupakan salah satu kriteria yang semakin meningkat peranannya, baik untuk investasi maupun peminjaman dana. Perhatian akan standar dan penerapan *corporate governance*, dengan demikian penerapan *corporate governance* merupakan suatu hal yang sangat penting dan mutlak diperhatikan dalam memasuki pasar global.

Isu *corporate governance* telah menarik perhatian publik karena tampaknya dipikirkan dalam pemulihan ekonomi baik perusahaan khususnya

maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian, konsep *corporate governance* kurang didefinisikan dengan baik karena berpotensi mempunyai perbedaan besar dalam fenomena ekonomi. Akibatnya, orang yang berbeda akan mempunyai definisi yang berbeda mengenai definisi *corporate governance* yang pada dasarnya merefleksikan *interest* pada bidang tertentu.

Masalah *corporate governance* mulai menjadi perhatian publik karena di beberapa negara Asia yang terkena krisis *financial* dan mengakibatkan semakin buruknya keadaan ekonomi di negara-negara tersebut (yang dimulai pada tahun 1997) salah satunya disebabkan karena lemahnya penerapan *corporate governance* di masing-masing negara (Tri Gunarsih, 2004). Masalah *corporate governance* terjadi di banyak negara misalnya di Inggris akhir dasawarsa 1980-an masalah *corporate governance* menjadi perhatian publik sebagai akibat publisitas masalah-masalah korporat seperti masalah kebangkrutan perusahaan dalam skala besar, penyalahgunaan dana *stakeholder* oleh para manajer, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya kaitan antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan, merger dan akuisisi yang merugikan perekonomian secara keseluruhan (Keasey dan Wright, 1997 dalam Tri Gunarsih, 2004.)

Indonesia juga tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda sebagian besar wilayah Asia. Kotler dan Herman dalam Kartajaya, 2000 dalam Barnabas S dan Hiras P, 2006 menyatakan ada tiga faktor yang menyebabkan Indonesia dilanda krisis ekonomi serta lamanya pemulihannya yaitu: (1) ektivitas sistem ekonomi makro yang diwarnai oleh korupsi kolusi

dan nepotisme, (2) proses investasi yang tidak efisien, tidak pasti serta terselubung, (3) praktik bisnis yang tidak wajar, pasar dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dan praktik bisnis yang mengutamakan teman dekat atau disebut kroni.

Adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah-masalah keagenan (*agency problems*). Masalah-masalah keagenan tersebut timbul karena adanya konflik atau perbedaan kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberi mandat) dan *agent* (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat). Teori keagenan (*agency theory*) berusaha menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa mengatasi konflik atau masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976 dan Eisenhardt, 1989 dalam Deni Darmawati, 2006)

Adanya kontrak yang efisien belum cukup untuk mengatasi masalah keagenan. Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai lanjutan teori keagenan (Ariyoto dkk, 2000 dalam Deni Darmawati, 2006). *Corporate governance* merupakan cara-cara untuk memberikan keyakinan pada para pemasok dana perusahaan akan memperoleh *return* atas investasi mereka (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Deni Darmawati, 2006). Menurut Cadbury, 2000 yang dikutip oleh Deni Darmawati, 2006 *corporate governance* adalah sistem untuk mengarahkan (*direct*) dan mengendalikan (*control*) suatu perusahaan/korporasi

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* merupakan sebuah konsep yang mulai disenangi oleh berbagai pihak (Ratna A, 2005). Secara teoritis praktik *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya penerapan *corporate governance* telah mendorong berbagai negara untuk mengembangkan dan memulai perbaikan *corporate governance* pada perekonomian mereka. Negara di Asia, pelaksanaan *corporate governance* bahkan mutlak dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi (FCGI, 2002 dalam Subhan Ams, 2005)

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni dkk, 2004)

Porter dalam Ratna Wardani (1991) menyatakan bahwa alasan perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut

diadaptasi dari Ratna Wardani (1991) menyatakan bahwa alasan perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut

*Governance* (GCG) dalam perusahaan. Struktur GCG dalam suatu perusahaan bisa jadi dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan.

GCG merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja perusahaan serta memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham (Adi, 2004 dalam Ratna A, 2005). Prinsip-prinsip tersebut adalah pertama *responsibility* yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, *accountability* yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, *fairness* yaitu perlakuan yang adil serta setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, *transparency* yaitu keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sri dan Haris, 2003 dalam Denny Risdianto, 2005)

Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan investor (Puspita Rinawati, 2005). Sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut akan membantu terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan

Penelitian mengenai efektifitas *corporate governance* dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain: Madiastuti dan Machofedz (2003) Veronica dan Bachtir (2004), Wedari (2004), Wilopo (2004), Boediono (2005) Veronica dan Utama (2005) dan Sugiarto (2004). Di negara-negara Asia, pelaksanaan *corporate governance* merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia, sebagai salah satu negara Asia yang terkena krisis ekonomi sangat mendukung pelaksanaan *corporate governance* sebagai salah satu langkah mengatasi krisis. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan sistem *corporate governance* ini adalah dengan menerbitkan dan membuat peraturan meliputi: (1) pendaftaran perusahaan, (2) pengungkapan data perusahaan dan (3) peraturan tentang tanggung jawab komisaris dan direksi (Puspita Rinawati, 2005).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) atau nota kesepakatan dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPI & SC dalam Umi Suci Marlina, 2005). Sejalan dengan hal tersebut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah ditetapkan di tingkat internasional. Hal senada juga disampaikan oleh

2005), yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar mempunyai tanggung jawab terutama untuk memperhatikan standar-standar *corporate governance* yang telah disepakati sebagai *best practices* bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, para penyandang dana, karyawannya, dan pada akhirnya pada perusahaan itu sendiri. Walaupun banyak perusahaan yang menyadari akan pentingnya penerapan prinsip GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut.

Pemerintah dan asosiasi-asosiasi bisnis pada beberapa negara, baik negara industri maupun negara berkembang, semakin menyadari pentingnya *corporate governance*, dan mensyaratkan untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mendapat modal dari publik dan investor. Sejak tahun 1992, puluhan negara telah memulai prakarsa-prakarsa nasional untuk memperbaiki sistem *corporate governance* pada perekonomian mereka. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan India telah menyusun laporan keuangan nasional dan mulai melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli level pemerintahan dan level perusahaan, hal ini sebagai perwujudan dari penerapan *corporate governance* yang sehat.

Sebagian besar negara-negara (termasuk Indonesia) telah memiliki badan/lembaga/institusi yang bertugas membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di negara yang bersangkutan. Bank dunia dan *Organization for Economic Co-operation and*

pengembangan prinsip-prinsip *corporate governance* diberbagai negara (termasuk Indonesia). Di berbagai negara bahkan dilakukan pemeringkatan implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan. *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLAS) telah menerbitkan laporan praktik *corporate governance* dari 494 perusahaan di 24 negara pada bulan Maret 2001. Korea *Stock Exchange* (KSE) telah melakukan survei di tahun 2001 terhadap praktik-praktik *corporate governance* dari 540 perusahaan yang terdaftar di KSE. Dengan membatasi pada salah satu komponen *corporate governance* yaitu, pengungkapan (*corporate disclosure practices*). Di Indonesia, pemeringkatan penerapan *corporate governance* oleh suatu perusahaan yang terdaftar di BEJ, sudah dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) secara kontinyu sejak tahun 2002.

Dengan ditemukannya bukti-bukti empiris tentang dampak positif dari kualitas *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan variasi penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan? mengapa terdapat perbedaan antar perusahaan dalam penerapan *corporate governance*? bahkan perbedaan penerapan untuk antar negara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *corporate governance* atau bisa kita sebut determinan dari implementasi *corporate governance* dapat bervariasi dikarenakan adanya variasi manfaat pengendalian yang diberikan pemegang dan biaya yang ditimbulkan bagi manajer dan pemegang saham perusahaan (Gillen dkk. 2003 dalam Dani Darmawati, 2006). Oleh karena masalah



keagenan bervariasi antar perusahaan, maka biaya dan manfaat bersih dari berbagai alternatif struktur *corporate governance* yang digunakan untuk mengendalikan masalah-masalah keagenan tersebut bervariasi. Variasi biaya dan manfaat dari implementasi *corporate governance* sangat ditentukan pada situasi lingkungan, industri maupun regulasi.

Beberapa penelitian sudah berhasil menemukan determinan dari implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan. Gillan dkk dalam Deni Darmawati (2003) telah menemukan bahwa variasi struktur *governance* dipengaruhi oleh faktor-faktor industri dan perusahaan. Drobezt dkk. (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali yang besar, kepemilikan *financial (financial holding)*, perusahaan yang dimiliki oleh kelompok *pyramid* (koalisi pemegang saham) memiliki kualitas *corporate governance* yang rendah. Adanya pengaruh faktor-faktor regulasi, industri dan perusahaan terhadap praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan telah berhasil ditemukan oleh Black dan Kim (2003). Durnev dan Kim (2003) telah berhasil menemukan bahwa perusahaan memiliki kesempatan investasi (*investment opportunities*) yang tinggi, kebutuhan pendanaan eksternal yang tinggi, dan lebih struktur kepemilikan terkonsentrasinya hak-hak terhadap aliran kas perusahaan menerapkan *corporate governance* yang berkualitas tinggi. Deni Darmawati (2006) juga telah menemukan faktor konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan

jenis kepemilikan BUMN dan Non-BUMN berpengaruh terhadap implementasi

Berkaitan dengan berbagai temuan empiris diatas, peneliti tertarik untuk melakukan investigasi determinan dari implementasi *corporate governance* di perusahaan publik di Indonesia. Sejak tahun 2000, Indonesia telah membuat langkah-langkah penting untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang menyebabkan krisis ekonomi 1997. Rerangka *corporate governance* sudah lebih diperbaiki walaupun masih belum begitu sempurna dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Laporan bank dunia terhadap penilaian penerapan *corporate governance* (*Report on Observance Standards and Codes: Corporate Governance Country Assessment*) yang diterbitkan bulan Agustus 2004 menyebutkan bahwa praktik-praktik *corporate governance* seringkali masih mengecewakan jika ditinjau dari prinsip-prinsip *corporate governance* yang disusun oleh OECD. Sistem regulasi untuk meningkatkan kualitas budaya dan praktik-praktik bisnis masih menjadi tantangan utama yang harus ditangani di Indonesia. Hasil penelitian Durnev dan Kim (2003) juga menunjukkan bahwa dari 27 negara-negara Asia, Indonesia memiliki sistem hukum yang berkaitan dengan proteksi investor yang rendah. Dengan masih lemahnya sistem hukum dan regulasi Indonesia, maka pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan beberapa perusahaan memiliki kualitas *corporate governance* yang lebih tinggi diantara perusahaan-perusahaan sejenis.

Berkaitan dengan berbagai temuan dan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

..... dalam perusahaan-perusahaan publik

yang terdaftar di BEJ terutama yang menjadi karakteristik perusahaan dibanding perusahaan lain yang mungkin menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas implementasi. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah

**“ Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi *Good Corporate Governance* ”**

#### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. penelitian ini memfokuskan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan mencapai indek 10 besar dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh CGPI dari tahun 2001 sampai tahun 2005. Peneliti ingin meneliti bagaimana ukuran direksi, ukuran dewan komisaris, *leverage* serta ukuran perusahaan berpengaruh terhadap implementasi *corporate governance* dalam perusahaan. Penelitian ini terbatas pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance* pada perusahaan yang terdaftar di BEJ untuk periode tahun 2001 sampai 2005

#### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam mengatasi masalah keagenan dapat dipandang sebagai suatu kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto dkk dalam Deni Darmawati, 2000).

...menyatakan cara untuk memberikan keyakinan kepada

pemasok dana perusahaan akan diperolehnya *return* atas investasi mereka (Shleifer dan Vishiny, 1997)

Upaya pengembangan GCG ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi atau penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan pemilik perusahaan terjaga. *Corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Masalah ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan *resources* perusahaan sepenuhnya ditangani para eksekutif.

Dari uraian diatas dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran direksi mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance*?
2. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?
3. Apakah *leverage* perusahaan mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah ukuran direksi mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan.
2. Untuk menguji apakah dewan komisaris mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan.
3. Untuk menguji apakah *leverage* perusahaan mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan.
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bidang teoritis:
  - a. Memberikan tambahan referensi untuk penelitian di bidang *corporate governance*.
  - b. Memberikan landasan pada penelitian selanjutnya untuk penelitian yang sejenis
2. Manfaat di bidang praktik:
 

Sebagai bahan masukan, informasi, pertimbangan dan landasan yang lebih kuat untuk perusahaan di Indonesia akan pentingnya implementasi